

B A B III
S A R E K A T I S L A M

A. Berdirinya Sarekat Islam

Sarekat Islam adalah merupakan salah satu Organisasi massa Indonesia yang berdiri sebagai kelanjutan dari Organisasi sebelumnya, yakni Sarekat Dagang Islam (SDI).

Faktor-faktor yang mendorong berdirinya Sarekat Dagang Islam tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama; politik Pemerintahan Belanda, khususnya bidang sosial budaya. Yakni membuat klasifikasi status sosial di masyarakat yang membagi-bagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan. Yaitu, golongan Eropah , golongan Timur Asia dan golongan penduduk Pribumi.¹ Dari pembagian klas yang berlaku ini telah menunjukkan dengan jelas akan rendahnya kedudukan penduduk Pribumi yang statusnya di bawah Belanda maupun orang Timur Asing. Klas-klas yang ada di atas Inlanders adalah merupakan kaum bangsawan yang harus dihormati, sedangkan rakyat Inlanders harus tunduk serta membungkuk-bungkuk sebagai realisasi penghormatan terhadap bangsawan tersebut. Adapun yang berhubungan dengan bidang

¹ Prof. Dr. Abu Hanifah menegaskan,....."Klas satu Belanda atau kulit putih. Klas dua Indo Belanda, Cina, Arab, India, yang dinamakan vreem de Ooterlingen. Klas tiga Inlanders, yaitu anak-anak Pribumi.
M.A. Ghani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Sarekat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 19.

keagamaan, Belanda berusaha untuk melemahkan kekuatan umat Islam disatu sisi, sementara disisi lain Belanda menjalankan usaha Zending (Kristenisasi). Usaha-usaha ini adalah merupakan politik Pemerintahan Belanda di bidang agama, karena Islam dipandang oleh Belanda sebagai suatu kekuatan dan momok bagi kelanggengan kekuasaan Kolonial di Indonesia.

Fenomina ini pernah digambarkan oleh Amelz sebagai berikut :

"Karena jikalau rakyat Indonesia menjadi politik bewust dan menjadi dasar terhadap hak-hak politiknya, niscaya bahaya besar akan menimpah penjajah, dan akan dapat merebut hak-haknya yang luhur itu. Terutama bagai Islam dan kaum muslimin tersebut, senjata-senjata yang khusus di tangannya penjajah. Belanda menginsyafi bahaya seperti yang dimbulkan oleh Tengku Tjhik di Tiro, oleh Imam Bonjol, oleh Diponegoro dan lain-lain Pemimpin Islam. Perjuangan melawan penjajah, bukan didasarkan semangat kepada kemerdekaan tanah airnya, terutama adalah karena didorong oleh kepercayaan keagamaan, yaitu kepercayaan hendak memusnakan golongan yang dzalim.²

Kedua; usaha Zending Pemerintahan Belanda, hal tersebut dilakukan adalah untuk mewujudkan kesamaan agama antara yang diperintah dengan yang memerintah (Belanda dan rakyat-Bumi Putra), sehingga kelangsungan pemerintah Belanda di Indonesia dapat dipertahankan. Sebab rakyat Indonesia yang mayoritas muslim hanya dapat menerima pemerintahan Kristen karena terpaksa, yang tidak dapat diwujudkan suatu hubungan yang kekal dan langgeng di antara rakyat Indonesia serta

²Amelz, HOS. Cokroaminoto Hidup dan Perjuangannya, Bulan Bintang, Jakarta, tt., hlm.96. Lihat ; M.A.Ghani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Sarekat Islam, hlm. 15.

Pemerintahan Belanda.³

Ketiga; keberhasilan kalangan Cina dalam menguasai dunia perdagangan, yang selanjutnya mendapat dukungan dari Belanda dalam melancarkan usaha-usaha mereka sehingga mereka dapat mendirikan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan pada tahun 1900 di Jakarta, yang bergerak di bidang pendidikan serta membentuk kamar-kamar dagang di kota-kota besar Indonesia. Aktifitas mereka menjadi semakin meningkat setelah adanya gerakan pembebasan yang terjadi di Cina pada tahun 1901.⁴ Keberhasilan tersebut telah menjadikan sikap angkuh penduduk Cina dengan memandang rendah terhadap kedudukan rakyat Indonesia. Kenyataan inilah kemudian mendorong didirikannya Sarekat Dagang Islam.

Sarekat Dagang Islam berhasil didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo oleh seorang dagang muslim di Solo oleh seorang pedagang muslim, H. Samanhudi.^{5/6} Yang selanjutnya dikembangkan di Jakarta pada tahun 1909 dan di Bogor tahun 1911 oleh Raden Mas Tirtiadisuryo. Organisasi ini didirikan mempunyai tujuan, di antaranya adalah :

1. Mengutamakan sosial ekonomi
2. Mempersatukan Pedagang-pedagang Batik
3. Mempertinggi derajat Bumi Putra

³Harry J. Benda, Bulan Tsabit Matahari Terbit, Pustaka Ka Jaya, Jakarta, 1980, hlm. 44

⁴Roeslan A. Ghani, Politik dan Ilmu, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1902, hlm. 44

^{5/6}M.A. Ghani, Op.Cit, hlm. 6.

4. Memajukan agama di sekolah-sekolah Islam.^{6 12}

Namun karena penggunaan Sarekat Dagang Islam dirasa kurang tepat dan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, maka melalui Konggres yang pertama pada tahun 1906 selanjutnya Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam.^{7 178}

Tujuan Organisasi berubah menjadi :

1. Memajukan perdagangan
2. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan
3. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani dari penduduk asli Bumi Putra
4. Memajukan kehidupan agama Islam.⁸

Dengan perubahan nama ini, selanjutnya dalam waktu yang singkat Sarekat Islam dapat cepat tersebar dan mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum muslimin di Indonesia.

Namun dengan meluasnya Sarekat Islam di tengah-tengah masyarakat mengundang kekhawatiran Pemerintah Belanda. Kekhawatiran Pemerintah ini terbukti dengan adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara rakyat lapisan bawah dengan orang-orang Cina. Sehingga kegiatannya pun

⁶ Ibid., hlm. 27.

⁷ Ibid., hlm. 10, 23.

⁸ Ibid., hlm. 27.

dihentikan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Agustus 1912.⁹

Namun, setelah terbukti bahwa Organisasi Sarekat Islam tidak mempunyai maksud membrontak, selanjutnya pihak Pemerintah mencabut pembekuannya pada tanggal 26 Agustus 1912. Akhirnya kedudukan Organisasi Sarekat Islam menjadi resmi sebagai Organisasi setelah HOS Tjokroaminoto (Ketua SI Lokal Surabaya) berhasil memperoleh pengakuan dari Pemerintah melalui Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912.¹⁰

B. Perkembangan Sarekat Islam

Setelah terjadi perubahan serta perluasan mengenai tujuan Sarekat Islam. Maka perkembangan Sarekat Islam pada periode awal ini adalah setelah memperoleh Akte Notaris Cokroaminoto pada tanggal 10 September 1912. Kemudian pada perkembangan berikutnya, SI mendirikan cabang-cabangnya di berbagai wilayah yang meliputi cabang Jawa Barat (meliputi Jawa Barat, Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya), cabang Jawa Tengah (meliputi Kalimantan), cabang Jawa Timur (meliputi Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau lain di Indonesia bagian Timur).¹¹

Pada dasarnya pengakuan melalui Akte Notaris yang telah diperoleh oleh Sarekat Islam ini bukanlah merupakan

⁹ Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 117

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm. 116.

pakan pengakuan sebagai Organisasi Nasional, melainkan suatu pengakuan yang berlevel lokal. Walaupun demikian ketentuannya, namun keberadaan Sarekat Islam lokal yang mulai didirikan di berbagai daerah tersebut diupayakan untuk selalu saling berhubungan sebagaimana menurut hasil Konggresnya ke I pada bulan Januari 1913, menekankan kepada kegiatan yang bersifat menyeluruh untuk wilayah Indonesia.^{12 21}

Upaya ini selanjutnya dibicarakan dalam suatu pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1916, dan diputuskan untuk membentuk suatu Badan Sentral yang diberi nama Central Sarekat Islam dengan pengurusnya yang terdiri dari:

1. Haji Samanhudi : Ketua Kehormatan
2. Tjokroaminoto : Ketua I
3. Abdul Moeis : Ketua II
4. Haji Agus Salim: Ketua III
5. Wondoamiseno : Anggota
6. Sosrokardono : Anggota
7. Alimin : Anggota
8. Dan Suryopranoto: Anggota.^{13 22}

Posisi Central Sarekat Islam (yang selanjutnya di singkat CSI) ini adalah sebagai badan central yang mengkoordinir hubungan dan kerja sama antara seluruh Sarekat Islam

^{21 12} Ibid., hlm. 118.

^{15 13} Panitia Buku Peringatan Sertus Tahun Haji Agus Salim, Seratus Tahun Haji Agus Salim, Sinar Harapan, Jkt. , 1984, hlm. 60.

lokal. Anggaran Dasar semua Sarekat Islam daerah... bertujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran
- b. Memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham yang keliru tentang Islam
- c. Mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara anggotanya.¹⁴

Adapun tujuan dari Central Sarekat Islam ini adalah memajukan dan membantu Sarekat Islam lokal dengan mengadakan dan memelihara perhubungan dan kerja sama di antara cabang-cabangnya.¹⁵ Selanjutnya badan ini dimintakan Aktenya Pemerintah dan mendapat pengkuan pada tanggal 18 Mart 1916. Kesanggupan Pemerintah dalam memberikan izin kepada CSI ini, karena pihak Pemerintah sendiri membutuhkan adanya badan sentral bagi Sarekat Islam lokal, yang dapat bertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan Pemerintah dari sekian cabang Sarekat Islam lokal.

Oleh karena itu dalam memberikan keputusan tersebut Pemerintah menekankan bahwa sentral Sarekat Islam diwajib-

²³¹⁴A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1984, hlm. 6.

¹⁵Ibid.

kan mengawasi tindakan-tindakan dari pada Sarekat Islam di daerah-daerah.¹⁶

Keputusan tersebut adalah merupakan upaya Pemerintah untuk melemahkan Sarekat Islam sebagai Organisasi yang mendapat simpati massa. Diakuinya Sarekat Islam secara lokal dengan Akte Notaris sendiri serta diakuinya Central Sarekat Islam sebagai badan yang bertanggung jawab atas Sarekat Islam adalah melemahkan gerak serta kedudukan Sarekat Islam Pusat, meskipun pengurus besarnya dapat melakukan Kongres secara Nasional dan dihadiri seluruh Sarekat Islam lokal kemudian memberikan pedoman-pedoman bagi Sarekat Islam lokal. Namun Central Sarekat Islam tetap kurang mempunyai kontrol yang kuat, serta mengadakan disiplin yang teratur terhadap Sarekat Islam Lokal. Sebab pada dasarnya mereka adalah berdiri sendiri dan hal ini memungkinkan untuk berdiri serta memisahkan diri.

Dengan demikian, maka susunan Sarekat Islam tersebut tidak akan terlalu kuat, sebagaimana yang telah dikehendaki Pemerintah dan sekaligus untuk mencegah tumbuhnya persatuan rakyat Indonesia.

Strategi Belanda yang terselip dalam memberikan ketentuan lingkup kepengurusan Sarekat Islam tersebut, ternyata berhasil. Karena dalam perkembangan selanjutnya Sarekat

¹⁶Susanto Tirtoprojo, Sejarah Pergerakan Nasional Indoensia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1982, hal. 28-29.

Islam semakin bertambah luas dan menjadi Organisasi yang besar. Hal ini terjadi setelah Sarekat Islam memperoleh tokoh-tokoh pimpinan yang potensial, di antaranya adalah Abdul Moeis sebagai seorang Bumi Putra berpendidikan dan berpengalaman birokratis, yang menentang ketidakadilan dan segala macam penderitaan rakyat Indonesia.

Beliau bergabung ke Sarekat Islam adalah atas permintaan Tjokroaminoto pada tahun 1912. Kemudian Haji Agus Salim, sebagai seorang Bumi Putra yang berpendidikan serta berpengalaman dalam agama Islam yang selalu menekankan pada prinsip-prinsip Islam sebagai dasar perjuangan Sarekat Islam. Keberadaan mereka inilah nantinya yang mampu memperkuat dan memperbesar existensi Sarekat Islam.

Sementara itu iklim pergerakan rakyat Indonesia telah dipengaruhi oleh faham-faham sosialis yang dipropagandakan oleh Sneefliet dan Barat sejak tahun 1913. Faham ini selanjutnya mulai masuk dan mulai mempengaruhi Sarekat Islam lokal khususnya wilayah Semarang yang dipimpin oleh Semaun, yang kemudian diperjuangkan untuk dijadikan ideologi bagi Sarekat Islam sejak tahun 1915.¹⁷

¹⁷ Strategi dasar PKI ialah bagaimana menghancurkan pengaruh tokoh-tokoh yang ada di dalam Sarekat Islam serta yang membawa Sarekat Islam secara keseluruhan dengan membawa infiltrasi ke dalam kelompok Komunis.
 Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 87.

Pengaruh ini terlihat ketika Sarekat Islam mengadakan Konggres Nasionalnya yang kedua pada tahun 1917 di Jakarta. Mereka mulai menekankan sikap radikal terhadap pemerintahan Belanda, dan menginginkan pemerintahan sendiri sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh kaum Kapitalis.¹⁸

Pengaruh golongan sosialis ini semakin berkembang, dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan Sarekat Islam. Sehingga dalam Konggres Nasionalnya yang ketiga pada tahun 1918 di Surabaya jumlah mereka meningkat menjadi 450.000 anggota yang terbesar di delapan tujuh Sarekat Islam lokal, yang kemudian dalam Konggres tersebut mereka mempengaruhi untuk menentang kaum Penjajah dan kaum Kapitalis secara membabi buta serta mengkordinir kaum buruh.¹⁹

Oleh karena adanya pengaruh tersebut, maka Sarekat telah mulai bergeser ke arah perjuangan yang radikal terutama kaitannya dengan keikutsertaan Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat. Sehingga dalam perkembangannya Sarekat Islam banyak menemui kesulitan, baik yang ditimbulkan pihak Belanda ataupun yang datang dari golongan Sosialis yang ada di tubuh Sarekat Islam.

Kesulitan tersebut di antaranya terdapat di dalam masalah penanganan kegiatan Sarekat buruh. Aktifitas ini

¹⁸A.K. Pringgodigdo, Op.Cit., hlm. 7.

¹⁹Susanto Tirtoprojo, Op.Cit., hlm. 31.

selanjutnya oleh pemerintah dihubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sekitar wilayah cabang-cabang Sarekat Islam. Sehingga Sarekat Islam dituduh sebagai dalangnya yang mengakibatkan banyaknya para anggota di tangkap oleh pihak pemerintah.

Sedangkan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan golongan sosialis adalah dalam kaitannya dengan keinginannya untuk turut memainkan peranan dalam memimpin pergerakan rakyat. Sehingga mereka berusaha untuk mempengaruhi anggota Sarekat Islam lainnya dengan cara menentang kebijaksanaan para Pemimpin Sarekat Islam. Kenyataan semacam di antaranya terlihat dalam pilihan tentang politik kebijaksanaan Partai dalam Indie Weerbaar Actie (Aksi Ketahanan Hindia) maupun dalam Volksraad (Dewan Rakyat).

Menurut Pimpinan Sarekat Islam, Volksraad adalah merupakan suatu langkah untuk mendirikan dewan perwakilan yang sebenarnya. Sebagai mana dikatakan oleh Abdul Moeis dan Haji Agus Salim, bahwa Volkraad adalah merupakan forum untuk aksi dan dapat bertindak sebagai penasehat bagi Parlemen Belanda, serta bertindak sebagai rem untuk bertindak terhadap anggota-anggota Parlemen yang konservatif. Sementara menurut Semaun, Volkraad adalah merupakan suatu pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum Kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak.²⁰

²⁰ Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 130

Sedangkan dalam masalah Indie Weerbaar, Central Sarekat Islam mendapat dukungan sejumlah seratus dua puluh dari Sarekat Islam lokal. Sementara yang tidak memberikan dukungan terdapat tiga Sarekat Islam lokal, termasuk yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian, dalam kaitannya dengan keikutsertaannya Sarekat Islam ke dalam Volkraad, hal ini ditempuh dengan melalui referendum Sarekat Islam lokal se-Jawa, dengan menghasilkan suara sebanyak dua puluh tujuh menerima dan dua puluh enam menolak. Sedangkan perbandingan suara dalam Central Sarekat Islam adalah enam dibandingkan lima suara yang menyetujui Tjokroaminoto.²¹

Mengingat pertentangan yang dilancarkan kaum pihak musuh (Komonis) semakin memuncak, maka melalui Konggres SI pada bulan Juli 1921 di Surabaya yang dipimpin oleh Abdul Moeis dan Agus Salim (ketika itu Tjokroaminoto berhalangan hadir sehubungan dengan persidangan kasus SI Afdeling B di Garut ya'ni Organisasi yang tertutup dan mungkin dapat dikatakan sebagai Organisasi bawah tanah yang secara resmi tidak mempunyai hubungan dengan Sarekat Islam), dibicarakan mengemai pengeluaran orang-orang Komunis dari tubuh Sarekat Islam yang selanjutnya berhasil menjalankan disiplin partai terhadap Komunis dengan hasil suara 23 lawan 7 suara.²² Dengan adanya disiplin partai tersebut maka para

²¹ Ibid.

" ²² Ibid. hlm. 140.

anggotanya yang terlibat, harus memilih satu dari dua pilihan ya'ni sebagai anggota Sarekat Islam dengan meninggalkan Komunis, atau menjadi anggota partai Komunis dengan meninggalkan Sarekat Islam.

Sebagai akibat dari pelaksanaan disiplin tersebut, selanjutnya Anggota Sarekat Islam yang pro Sosialis secara serentak keluar dari tubuh Sarekat Islam yang pada kelanjutannya menamakan diri sebagai SI Merah. Penggunaan nama dengan tetap memakai Sarekat Islam, dimaksudkan untuk mengelabui massa Muslim,²³ juga sebagai upaya untuk menentang C.S.I. "putih" dari Tjokroaminoto.²⁴

Dengan adanya disiplin terhadap kalangan Komunis tersebut selanjutnya Sarekat Islam mengalami kemerosotan jumlah anggota yang dapat melemahkan posisi organisasi. Untuk mengatasi hal ini maka dalam kongresnya pada pada bulan Pebruari 1923 di Madiun, diputuskan untuk merubah Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam,²⁵ karena perubahan menjadi Partai ini diharapkan agar anggotanya menjadi aktif dan mau bekerja di dalam SI lokal untuk kepentingan Partai. Upaya lain yang ditempuh oleh para pimpinan P.S.I. ini adalah mengadakan propaganda Partai. Dalam Propaganda

²³Ahmad Syafi'i Ma'arif, Op. Cit., hlm. 87.

²⁴A.K. Pringgodigdo, Op. Cit., hlm. 26.

²⁵Susanto Tirtoprojo, Op. Cit., hlm. 37.

persatuan bagi Sarekat Islam lokal ini Tjokroaminoto pergi ke Kalimantan dan Sulawesi untuk memberikan pengarahannya dan propaganda persatuan bagi seluruh Sarekat Islam. Sementara Abdul Moeis berangkat ke Padang dengan tujuan yang sama, sementara itu Agus Salim menempuh dengan jalan berusaha menjaga serta memperkokoh persatuan umat Islam dengan jalan Pan Islam.²⁶ Dalam hubungannya dengan usaha-usaha beliau tersebut, PSI berhasil mengadakan kerja sama dengan perkumpulan Muhammadiyah. Kerja sama tersebut terutama didasarkan atas masalah kekhalifahan ya'ni persatuan Umat Islam dibawah satu pimpinan. Dengan adanya usaha Agus Salim ini, selanjutnya Sarekat Islam mulai mengadakan kongres Islam, dan yang pertama berhasil diadakan di Cirebon pada tahun 1924, yang kedua diadakan di Garut pada tahun yang sama.²⁷ Kongres al-Islam ini selanjutnya dikembangkan pada tingkat Internasional yang selanjutnya disebut Kongres Islam Se-dunia Cabang Hindia Timur atau Mu'tamar al-Alam al-Islam Far'ul Hind asy-Syarqiy (MAIHS).²⁸

Perkembangan Sarekat Islam selanjutnya adalah mengalami perubahan nama lagi. Pada tahun 1929, dari Partai Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Perubahan tersebut berhubungan dengan adanya penga-

¹³ ²⁶ Chaidir Anwar, MA., Sejarah Pergerakan Umat Islam di Indonesia, Diktat FKSS. IKIP. Bandung, 1972, hlm. 24.

¹⁹ ²⁷ Ibid.

¹⁵ ²⁸ Ibid. hlm. 25.

ruh aliran Nasionalis yang menghendaki untuk lebih di per-
tegas lagi tentang ide ke-Indonesia-an di dalam partai
untuk itu perlu ditambah kalimat Indonesia sehingga menjadi
Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).²⁹ Setelah itu di-
usahakan untuk diadakan perbaikan dalam birokrasi kepeng-
urusannya, sehingga dalam kongres PSII pada tahun 1930 di-
adakan pembentukan badan baru dalam Partai. Maka dibentuk-
lah Dewan Partai (badan yang mengurus urusan sehari - ha-
ri), Lajnah Tanfidiyah (badan Eksekutif partai). Dewan
Partai diketuai oleh Tjokroaminoto dan Agus Salim sebagai
wakilnya, sementara Lajnah Tanfidiyah diketuai Sangaji
dan wakilnya dipegang oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo.³⁰

Pada tahun 1932 terjadi pertentangan di kalangan
pimpinan PSII yang berselisih tentang masalah asas daripada
Organisasi antara pihak Tjokroaminoto dan Agus Salim yang
menghendaki asas Islam, sementara pihak Dr. Sukiman dengan
Surjopranoto menginginkan asas Kebangsaan sebagai dasar di
dalam Partai. Pertentangan ini berakhir dengan keluarnya
pihak Sukiman dari tubuh PSII yang kemudian mendirikan
Partai baru dengan nama Partai Islam Indonesia (PARII) ,
di Yogyakarta.³¹

²⁹ A.K. Pringgodigdo, Op. Cit., hlm. 42.

³⁰ Ibid, hlm. 43.

³¹ Susanto Tirtoprojo, Op. Cit., hlm. 39.

Pertentangan dalam tubuh PSII kembali muncul sehubungan dengan adanya keinginan untuk koperator dan non-koperator partai terhadap pemerintah. Keinginan tersebut selanjutnya menimbulkan kelompok yang pro dan kontra terhadap pilihan tersebut, yang berakhir dengan keluarnya Agus Salim sebagai kelompok yang menginginkan koperator partai kepada pemerintah, pada tahun 1936 yang kemudian mendirikan Barisan Penyedar PSII pada tahun 1937.

Dengan keluarnya kelompok Penyedar dari tubuh PSII, maka untuk tetap dapat memperkuat partai, diadakanlah usaha untuk mempersatukan kembali dua partai yang pernah bertentangan antara PSII dengan PARII pada bulan Juli 1937. Tetapi di dalam kelangsungan hidup kepartaiannya, ternyata orang-orang PARII (Sukiman) merasa tidak mendapat kesempatan berkkiprah seperti yang diinginkan sebelumnya, sehingga mereka keluar lagi dari PSII untuk yang kedua kalinya dan kemudian mendirikan Partai Islam Indonesia dengan disingkat PII, pada tahun 1937.³²

Perkembangan selanjutnya adalah bergabungnya PSII dalam GAPI sebuah badan yang terdiri dari gabungan partai partai politik Indonesia. Namun ternyata partisipasi PSII dalam GAPI kali ini terdapat sebahagian pemimpin PSII yang tidak menyetujui tentang partisipasi tersebut, sehingga menimbulkan pertentangan dan berakibat keluarnya mereka dari

³² Ibid.

tubuh PSII. Kelompok ini kemudian mendirikan organisasi dengan di beri nama Partai Sarekat Islam Tandingan (PSSI-Tandingan) yang dipimpin oleh S.M. Kartosawiryo³³ Dengan menggunakan nama PSII Tandingan ini, karena aturan-aturan organisasinya tetap sama dengan PSII, hanya pengurus besarnya saja yang berbeda.

Demikianlah perkembangan Sarekat Islam sebagai pergerakan politik umat Islam Indonesia yang pernah menjadi organisasi massa yang besar, pada akhirnya mengalami perpecahan menjadi empat, ya'ni;

1. Partai Sarekat Islam Indonesia Abikusno
2. Partai Sarekat Islam Indonesia Kartosuwiryo
3. Partai Islam Indonesia
4. Penyedat Haji Agus Salim.

C. Lingkup Perjuangan Sarekat Islam

Keberadaan Sarekat Islam adalah sebagai organisasi massa yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia. Di dalam mewujudkan tujuan tersebut, selanjutnya Sarekat Islam berusaha memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat meliputi bidang ekonomi, sosial, keagamaan serta politik.

a. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Sarekat Islam berusaha memper

³³ Mukayat, Drs., Haji Agus Salim, The Grand Old Man of Indonesia, Dep. P&K Proyek Buku Terpadu, Jakarta, 1985 hlm. 52.

perbaiki tingkat ekonomi rakyat dengan berbagai tuntutan pada pemerintah Belanda melalui kegiatan propagandanya sebagai berikut :

1. Meningkatkan semangat dagang rakyat

Sarekat Islam membentuk usaha-usaha dagang dibidang hasil bumi dan menangani usaha-usaha jasa angkutan. Maka didirikanlah suatu koperasi konsumsi, seperti ; mendirikan toko dan warung koperasi, yang dimodali oleh anggota Sarekat Islam.³⁴

Sebagai wujud dari usaha-usaha tersebut, Sarekat Islam melaksanakan ceramah-ceramah tentang masalah ekonomi dalam setiap kesempatan rapat-rapat, untuk diterapkan diterapkan dalam bentuk kehidupan nyata di masyarakat.

2. Menghapuskan keresahan kaum buruh

Dalam bidang perbaikan sistem keuangan dan ekonomi, Sarekat Islam memohon pada pemerintah agar pajak-pajak di pungut secara proporsional, dan ditarik dari laba perkebunan. Selanjutnya, pemerintah diminta untuk membantu perkumpulan koperasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perburuhan yang lebih baik.

Terhadap kondisi tersebut, Sarekat Islam mengajukan tuntutan pada pemerintah Belanda sebagai berikut :

³⁴A.P.E. Korver, Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil, PT. Tempirin, Jakarta, 1985, hlm. 89-92.

1. Poenali Santrrie harus dihapuskan
2. Gaji kuli minimu 60 persen sehari
3. Jam kerja delapan jam
4. Pihak kuli juga berhak mengakhiri kontrak kerjanya
5. Bagi kuli kontrak yang habis masanya, akan mendapatkan hak guna usaha
6. Perkara sengketa dengan kuli diputuskan oleh Landrechter
7. Wanita pekerja berhak cuti sejak hamil 7 bulan sampai sesudah melahirkan bayi 40 hari
8. Kerja cangkul tidak dipikulkan oleh pihak wanita
9. Didirikannya sekolah untuk anak-anak kuli
10. Larangan berjudi.³⁵

c. Memperbaiki sistem perekonomian rakyat

Sarekat Islam menuntut pada pemerintah, agar memperluas jaringan-jaringan lahan pertanian, dan memperbaiki sistem irigasi rakyat. Kemudian, dalam kaitannya dengan beberapa pengusaha atau industri-industri penting serta mempunyai sifat monopoli, maka Sarekat Islam berusaha di Nasionalisir. Karena itu, pada waktu Konggres yang diadakan di Surabaya pada tahun 1918, Organisasi ini sangat menentang pemerintah sepanjang tindakan pemerintah menjadi Kapitalisme.³⁶

³⁵ Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 113.

³⁶ A.K. Pringgodigdo, Op.Cit., hlm. 8.

Selanjutnya dalam perjuangan-perjuangan berikutnya, tepatnya pada tahun 1930-an, yaitu pada waktu bangsa Indonesia mengalami masa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Kapitalisme dan Imperialisme, Sarekat Islam mengambil tindakan terhadap pemerintah untuk mengatasi situasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan tanah-tanah baru atau tanah kosong, kecuali bagian yang diperlukan untuk kepentingan hutan
2. Penyetopan hak-hak pemberian konsesi tanah
3. Distribusi kepada rakyat banyak tentang beberapa tanah yang hak sewanya telah berakhir
4. Distribusi beberapa tanah konsesi yang perjanjinya tidak dipenuhi sepenuhnya oleh si penyewa.³⁷

Dengan demikian, maka gerakan ini mempunyai arti di dalam membantu, mempermudah dan mengembangkan semangat terhadap kebangkitan usaha Nasional. Dengan harapan menghidupkan kapital bagi Bumi Putra serta menarik orang-orang Bumi Putra yang berkapital untuk memperbaiki kebangsaan.

b. Bidang agama

Agama (khususnya Islam) adalah merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendorong aktifitas masyarakat menuju suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dan mapan. Karena itu, bagi Sarekat Islam dipandang sebagai sarana yang

³⁷ Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 161.

sangat penting dalam merealisasikan kesadaran politik bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Adapun kegiatan Sarekat Islam dalam membina masyarakat ke dalam kehidupan beragama, melalui usaha-usaha sebagai berikut :

1. Berupaya untuk menyebar luaskan dan meningkatkan faham keislaman dalam lembaga-lembaga pendidikan. Maka di tahun 1915 Organisasi ini mendirikan suatu pendidikan Guru bagi sekolah-sekolah agama. Yang kemudian dalam Konggresnya yang pertama membentuk suatu panitia untuk mengumpulkan dana bagi sekolah tersebut.³⁸
2. Mengharuskan anggota Sarekat Islam untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang agama.
3. Bersikap tidak berlebih-lebihan terhadap segala hal serta tidak melakukan penipuan, pembakaran dan kejahatan yang dilarang oleh agama Islam.
4. Mendirikan tempat-tempat ibadah serta memberikan insentif kepada pegawai yang mengelolanya. Terutama pihak pemerintah agar menggaji pada guru ngaji dan penghulu.³⁹
5. Menyelenggarakan ceramah-ceramah tentang soal-soal keagamaan, menerbitkan majalah dikalangan bangsa Indonesia umumnya dan anggota Sarekat Islam khususnya.
6. Mengusahakan terciptanya persatuan (Ukhuwah Islam

⁵⁸ Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 142.

⁵⁹ A.P.E. Korver, Op.Cit., hlm. 52.

Islamiyah). Dalam hal ini Sarekat Islam telah memprakarsai usahanya seperti ; Konggres al-Islam, yang dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 1922, yang kemudian pada tahun 1926 dirubah menjadi Mu'tamar al-Islam Far'ul Hind Asy-Syarkiyah (MAIHS), yaitu suatu Organisasi Haji Hindia (Indonesia) atau Handz Organisasi Hindia pada tahun 1926.⁶⁰

7. Membentuk suatu panitia yang disebut "Tentara Nabi".⁶¹ Yaitu suatu tempat Perkumpulan Orang-orang Islam yang menjaga dan melindungi kehormatan agama yang dibawa Rasulullah Muhammad. Usaha ini bertujuan untuk menolak serangan-serangan yang dilancarkan Perkumpulan Study Club ke kelompok Nasionalis dalam menyebarkan faham Kristenisasi.⁶²

c. Bidang sosial kemasyarakatan

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, maka Sarekat Islam berusaha keras mengatasi kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan kaum proletar, dan antara tuan tanah dengan kaum buruh.

Dalam hal ini, orientasi penekannya Sarekat Islam lebih banyak diarahkan pada masalah-masalah perbaikan lembaga pendidikan. Yaitu menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid di sekolah - sekolah serta terlaksananya wajib belajar untuk semua penduduk sam

⁶⁰ A.K. Pringgodigdo, Op.Cit., hlm. 45.

⁶¹ Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 143.

⁶² W. Poespoprojo, Jejak-jejak Sejarah 1908 - 1926, CV. Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.46.

sampai berusia 15 tahun, perbaiki lembaga-lembaga pendidikan semua tingkat pendidikan, bertambahnya sekolah, masukkan pelajaran-pelajaran ketrampilan, perluasan sekolah hukum, sekolah kedokteran menjadi Universitas dan pemberian bea-siswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar ke luar negeri.⁶³

Sarekat Islam meminta perhatian khusus untuk pendidikan rakyat, ia yakin bahwa pendidikan rakyat yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan perubahan keadaan rakyat menjadi baik, dan kedewasaan bangsa menjadi maju secara berkelanjutan.

Dalam memperjuangkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan perlakuan hukum, maka Sarekat Islam menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menegakkan hukum yang sama di antara golongan penduduk negeri. Karena itu hendaknya, diberi kemudahan bagi penduduk yang miskin untuk mendapatkan dan memperoleh perlindungan hukum dalam menghadapi permasalahan atau sengketa.⁶⁴

d. Bidang politik

Dalam bidang pemerintahan, Sarekat Islam memperjuangkan rakyat untuk memberikan haknya dalam keikutsertaan

⁶³Deliar Noer, Op.Cit., hlm. 128.

⁶⁴Ibid.

nya terjadinya pembuatan Undang-Undang pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini didasarkan Undang-Undang tentang desentralisasi pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1903 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang memuat tentang keputusan Ratu Belanda yang memandang perlunya di masing-masing Karesidenan (bagian-bagian daerah) membuka kemungkinan untuk mencapai pemerintahan sendiri.⁶⁵

Untuk itu, Sarekat Islam mengusulkan peraturan yang berisi sebagai berikut :

1. Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Desa, seseorang sedikitnya harus lulus dari sekolah Bumi Putra kelas dua.

2. Kepala Desa harus dibebaskan dari tugas kepolisian, sehingga waktunya lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya.

3. Kepala Desa harus tunduk kepada Dewan Desa, yang anggotanya dari wakil-wakil penduduk.⁶⁶

Hal ini adalah suatu bentuk ketatanegaraan yang dipropagandakan Sarekat Islam dalam Konggresnya di Surabaya ke IV pada tahun 1919. Yaitu membentuk Dewan rakyat yang terdiri dari dua Majelis, antara lain sebagai berikut :

1. Ereste Kamer ; yang merupakan suatu sentrak Sarekat Islam Sekerja, dan meliputi dari wakil-wakil buruh dan

⁶⁵Mohammad Roem, Tiga Peristiwa Bersejarah, Know, PT. Sinar Hudaya, Jakarta, 1972, hlm. 14-15.

⁶⁶A.P.E. Körver, Op.Cit., hlm. 101-102.

wakil-wakil buruh tani.

2. Tweedi Kamer ; yang meliputi wakil-wakil dari partai-partai politik.⁶⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, Sarekat Islam sangat keras menolak sistem politik keagamaan pemerintah Kolonial terhadap Islam. Politik tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menghambat gerak kemajuan Islam serta menghilangkan pengaruh Islam di kalangan rakyat Indonesia. Sementara di pihak lain, pemerintah Kolonial membantu penyebaran -pe nyebaran agama Kristen di Indonesia. Seperti ; membantu kegiatan-kegiatan sekolah Kristen, memajukan pengamalan-pengamalan Kristen dalam kehidupan masyarakat dan dalam praktek administrasi pemerintahan.⁶⁸

Pelaksanaan politik tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk :

1. Diberlakukannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti ; adanya sirkulasi minggu, sirkulasi pasar, peraturan tentang pendidikan Islam.

2. Campur tangan pemerintah dalam praktek beragama Islam rakyat Indonesia, yang dinilai tidak tepat dan berlebihan, seperti ; pengangkatan penghulu sebagai fungsionaris Islam.⁶⁹

⁶⁷A.K. Pringgodigdo, Op.Cit., hlm. 8.

⁶⁸W. Poesprodjo, Loc.Cit. hlm.

⁶⁹Herry J.Benda, Bulat Tsabit Matahari Terbit, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, hlm. 103.

Terhadap politik ini, Sarekat Islam melaksanakan berbagai upaya untuk mengadakan penolakan yang antara lain sebagai berikut :

1. Mengemukakan kekecewaan dan kemarahan umat Islam serta mengkritik pemerintah, selanjutnya menyarankan perbaikan atau pembenahannya bahkan meminta untuk mencanutnya.

2. Membentuk lembaga-lembaga keagamaan di lingkungan umat Islam sebagai lembaga tandingan dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda.

3. Mengeluarkan pertanyaan terbuka terhadap pemerintah, dan mengancam akan melakukan membaikotan oleh warga Sarekat Islam terhadap ketentuan dan peraturan pemerintah, bila tuntutannya akan hal itu tidak dipenuhi.⁷⁰

Dengan aktifitas Sarekat Islam dalam memperjuangkan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Yang meliputi berbagai aspek kehidupan mereka, baik ekonomi, agama sosial dan politik dalam rangka menumbuhkan dan sekaligus menggerakkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menuju terciptanya kemerdekaan Indonesia.

⁷⁰Herry J. Benda, Ibid., hlm. 115.